

Lengkapi Fasilitas Perkotaan, Cibinong Butuh Uluran Tangan Investor

CIBINONG (IM)- Petaan Kecamatan Cibinong sebagai kawasan perkotaan masih menunggu uluran anggaran dari para pengusaha atau investor. Karena sudah ada Komplek Olahraga Pakansari, hutan kota, pusat perdagangan, hotel, Cibinong Situ Plaza, pedestrian di beberapa ruas jalan utama hingga Alun-alun Giri Mekar, Kecamatan Cibinong sudah dipastikan bukan lagi kampung besar.

"Kecamatan Cibinong bakal ada transportasi publik, transit of development (TOD), jalur sepeda, pembangunan venue olahraga, pembangunan apartemen dan lainnya. Oleh karena itu kami butuh uluran tangan dari investor untuk mewujudkan hal tersebut," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra kepada wartawan, Senin (6/2).

Suryanto Putra menerangkan bahwa alasan butuh uluran tangan investor karena Pemkab Bogor memiliki keterbatasan anggaran dan juga keharusan membangun di 39 kecamatan lainnya. "Kecamatan Cibinong sebagai ibu kota harus dilengkapi fasilitasnya, kami yakin ini menjadi magnet dan menarik minat para investor," terang Suryanto Putra.

Menyadari adanya peralihan fungsi tata ruang di

Kecamatan Cibinong dan bakal ada potensi bencana alam terutama banjir, ia pun mengimbau agar masyarakat Cibinong tidak membangun rumah ataupun bangunan di garis sepadan sungai.

"Jangan membangun bangunan di sempadan sungai, masyarakat harus menata kawasannya hingga Kecamatan Cibinong tidak menjadi daerah rawan bencana alam banjir seperti yang terjadi di beberapa kelurahan," paparnya.

Terkait kepadatan penduduk di Kecamatan Cibinong, Suryanto pun mengajak masyarakat mau tinggal di hunian vertikal atau apartemen. Karena, ibu kota Kabupaten Bogor ini bakal ada transportasi publik salah satunya Lintas Rel Terpadu (LRT).

"Mudah-mudahan nanti setelah ada transportasi publik dan beberapa ruas jalan baru termasuk Jalan Raya Bojonggede-Kemang (Bomang), masyarakat nantinya tertarik tinggal di apartemen. Lahan di Kecamatan Cibinong dan sekitarnya sudah mulai sempit atau terdesak karena tingginya kebutuhan pemukiman," jelas Suryanto. ● **gio**

Pemkab Bogor Beri Jaminan Kesehatan Ribuan Aparatur Desa



Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab menerangkan mekanisme pemberian jaminan kesehatan ribuan aparatur desa.

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan jaminan kesehatan kepada ribuan aparatur desa se Kabupaten Bogor.

Hal ini dilakukan Pemkab Bogor, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor, sebab hidup sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, karena setiap orang berhak mendapatkan hidup sehat dan sejahtera.

Salah satunya dilakukan melalui pemberian jaminan kesehatan terhadap aparatur Pemerintah Desa se-Kabupaten Bogor dengan BPJS Kesehatan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah.

Itu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab Pemkab Bogor untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan jaminan kesehatan kepada masyarakat khususnya para aparatur desa sebagai ujung tombak Pemerintah Kabupaten Bogor yang dapat meningkatkan hingga tingkat pesolok desa. Bahkan jaminan kesehatan bagi aparatur desa itu tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Seperti yang diketahui bahwa program jaminan kesehatan bagi aparatur desa itu telah berjalan sejak tahun 2020 lalu yang artinya sudah berjalan selama tiga tahun. Untuk tahun 2023, ada sekitar 4.754 aparatur desa se-Kabupaten Bogor yang mendapatkan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab menerangkan bahwa mekanisme jaminan kesehatan tersebut dilakukan dengan

cara bantuan pembayaran iuran bagi aparatur desa sebesar 5% dengan ketentuan 4% dari APBD Kabupaten Bogor dan 1% APBD Desa, utamanya ADD atau dana lain selain Dana Desa.

"Melalui jaminan kesehatan ini kami memastikan bahwa semua perangkat desa terlindungi kesehatannya hingga fasilitas layanan kesehatannya, sebagai wujud tanggung jawab Pemkab Bogor untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan jaminan kesehatan kepada masyarakat khususnya para aparatur desa yang ada di seluruh Kabupaten Bogor," jelas Reynaldi.

Perlu diketahui bahwa, selain bagi peserta BPJS itu sendiri, jaminan kesehatan ini juga berlaku bagi lima jiwa yaitu, terdiri dari 1 orang Kades/Perangkat Desa, 1 orang istri/suami dan 3 anak berdasarkan urutan kelahiran.

"Mudah-mudahan setelah jaminan kesehatan ini kita tanggung, semua perangkat desa mulai dari kepala desa sampai dusun mereka bisa terlindungi, terjamin kesehatannya dan makin merasa nyaman juga, lebih optimal dalam menjalankan tugas dan kerjanya," tandas Kepala DPMD Kabupaten Bogor.

Terpisah Kepala Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Udin Saputra menyatakan, sangat menyambut baik program jaminan kesehatan bagi aparatur desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Bogor, kami sangat terbantu yang tadinya belum punya, yang mandiri sekarang kami semua dipastikan terfasilitasi jaminan kesehatannya," imbu Kades Ciangsana. ● **gio**

8 Nusantara



RUANG EDUKASI TERAKOTA

Seorang guru mendampingi siswa berkegiatan di Ruang Edukasi Terakota usai diresmikan di Cidadap, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/2). Pemerintah Kota Bandung meresmikan Ruang Edukasi Terakota yang merupakan ruang terbuka hijau dengan dilengkapi sarana pembelajaran seperti kursi dan papan tulis serta sarana penunjang lainnya.

Mahasiswa Harus Peduli Persiapkan Kualitas SDM untuk DOB Bogor Barat

"Mahasiswa harus berperan dalam persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat. Untuk mempersiapkan semua itu perlu adanya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor pergerakan. Karenanya, mahasiswa harus menjadi agent of control dalam semua bidang, ujar Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TP2S) Kabupaten Bogor," ujar Aep Saepudin Muhtar.

CIBINONG (IM)- Akademi Universitas Djuanda, Aep Saepudin Muhtar mengajak mahasiswa peduli dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat.

"Untuk mempersiapkan semua itu perlu adanya sumber daya manusia berkualitas

sebagai motor pergerakan," kata pria yang akrab disapa Gus Udin itu saat menjadi pemateri dalam Rapat Kerja Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) di Cisarua, Bogor, Senin (6/2).

Ia menyebutkan mahasiswa setempat harus berperan untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Bogor yang

tergolong masih rendah.

"Sebagai seorang mahasiswa yang berdomisili di Rumpin, sudah menjadi kewajiban untuk bersama meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bogor, terkhusus Rumpin, mahasiswa haruslah menjadi agent of control dalam semua bidang," ujarnya.

Gus Udin yang juga anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TP2S) Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa pemekaran wilayah Bogor Barat akan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Rumpin, mengingat wilayah tersebut salah satu yang potensial di Bogor Barat.

"Mengingat topografi Rumpin sangat ideal, sehingga memungkinkan sekali apabila Rumpin menjadi ibu kota Bogor Barat nantinya. Sumber daya alam yang melimpah haruslah menjadikan Rumpin sebagai wilayah maju di Kabupaten Bogor," ujar

Gus Udin.

Sementara itu Ketua Umum HMR, Wildan Muholid di tempat yang sama, mengamini apa yang dipekan oleh Gus Udin. Menurutnya, ke depan Rumpin harus lebih berkembang dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Rumpin ke depan harus lebih berkembang dalam hal persoalan pendidikan, infrastruktur dan sosial, sehingga Rumpin bisa lebih siap dan mampu," kata Wildan.

Wacana pemekaran wilayah barat Kabupaten Bogor sudah mengemuka sejak tahun 2000. Saat itu Forum Komunikasi Masyarakat Bogor Barat (FKMB2) paling vokal menyuatkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat.

Bertahun-tahun disuarakan, aspirasi itu kemudian direspons pada tahun 2005 oleh Pemerintah Kabupaten

Bogor, diawali dengan pelaksanaan seminar mengenai pengembangan wilayah.

Kemudian, tahun 2006 Pemkab Bogor mulai melakukan penelitian pengembangan wilayah dengan menggandeng PT Bermuda Jasa Utama (BJU).

Berselang satu tahun, September 2007, DPRD Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan (SK) No 12 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan DOB Pemekaran Daerah Kabupaten Bogor.

Dalam keputusan tersebut ditentukan ada 14 kecamatan di Kabupaten Bogor yang akan memisahkan diri dengan nama daerah Kabupaten Bogor Barat.

Kecamatan tersebut, antara lain Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Cigugur, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang, dan Rumpin.

● **gio**

Bertahun-tahun Warga Kecamatan Rancaekek Konsumsi Air Tanah Kotor

BANDUNG (IM)- Bertahun-tahun Ahyar (43), warga Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mesti mengonsumsi air tanah yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Air tanah yang disedot menggunakan pompa jet itu kuning kecoklatan serta bercampur tanah.

Agar bisa mengonsumsi air tanah yang kotor itu, Ahyar harus mengakali dan mensiasati ketika sedang menyedot air. "Saya pindah ke sini tahun 2005 kondisinya sudah gini, tapi dulu mah enggak terlalu parah seperti sekarang," katanya ditemui, kemarin.

Rata-rata, kata dia, warga mesti menyaring air atau mengendapkan campuran tanah. Caranya, mendiamkan air itu dalam ember selama beberapa hari. Tidak sedikit juga warga yang menggunakan zat kimia agar air tanah tersebut bisa kembali bening. "Berbagai cara lah, kalau saya disaring dulu, diendapkan, makanya banyak wadah (tempat) yang saya siapkan untuk proses itu," ujarnya.

Tidak hanya air tanah yang ditarik menggunakan mesin pompa jet saja yang kondisinya

seperti itu. Ahyar menyebutkan, kualitas air sumur pun sama. Bahkan warga yang masih memiliki sumur di wilayahnya mengeluhkan kualitas airnya kuning dan sedikit mengeluarkan bau.

"Kalau di tetangga yang pakai sumur kadang ada bau, makanya enggak kepeka sama sekali, akhirnya dia juga minta ke yang lain dengan kualitas air yang serupa tapi enggak berbau," kata Ahyar.

Sejak mengetahui, kualitas air di tempat tinggalnya tidak layak, Ahyar terpaksa harus merogoh kocek lebih untuk membeli air bersih untuk bisa dikonsumsi terutama minum dan mencuci pakaian. Dalam satu minggu, ia bisa membeli air bersih sebanyak dua atau tiga kali, tergantung kebutuhan.

"Kalau minum saya beli air bersih, 500 liter itu Rp 65.000 jadi dimasukkan ke penampungan berupa toren, itu saya pakai buat minum atau nyuci pakaian," tuturnya.

Ia mengungkapkan, kondisi seperti ini sudah ia rasakan bertahun-tahun. Baginya yang hanya buruh pabrik, ia tak punya pilihan lain selain mensiasati kondisi tersebut. "Gimana

lagi, saya orang pas-pasan, mau pindah juga enggak ada uang. Ini aja untuk dapet rumah ini mati-matian dulu," kata dia. Hal senada dikatakan Ade Parman (50), yang juga warga Kecamatan Rancaekek. Dia mengaku tak bisa mengandalkan air tanah karena bau dan kotor. "Kalau pakai air tanah, keluarnya kuning, bau, kotor. Tangan dan baju kita juga bisa kuning," kata Ade.

Ade merasa, memiliki pompa penyedot air di wilayahnya merupakan hal yang sia-sia. Meski warga sudah menyedot dengan pompa air, tetap saja air tersebut tak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. "Saya masih bersyukur air ada, maksudnya enggak kekeringan, cuma kualitasnya enggak layak, jadi yang kami keluhkan bukan soal ada atau tidaknya air tapi kualitasnya," jelas dia.

Berbeda dengan Ahyar, Ade terpaksa harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga Rp 2.000-2.500 per dirigen. "Ya memang jelek airnya, enggak bisa dipake apa-apa. Emang dari dulu kondisinya kayanya gini, mau gimana lagi," kata Ade. ● **pra**

MUKA AIR TANAH TURUN

Yana Mulyana Ajak Masyarakat Bijak Dalam Memanfaatkan Air

BANDUNG (IM)- Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengajak, masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan sumber air tanah seiring menurunnya kondisi muka air tanah di Bandung Raya. "Kita berharap semakin bijak ya dalam memanfaatkan air. Ini sebetulnya kewajiban bersama untuk kita jaga. Ya itu tadi, kenapa penggunaan air tanah itu saat ini dibatasi," kata Yana Mulyana, Senin (6/2).

Menurut Yana Mulyana, menjaga permukaan air tanah menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak dapat bekerja secara sendiri dalam melakukan hal tersebut. "Termasuk kita menabung air lewat kolam renster, drumbiopori yang kapasitasnya sampai 200 liter. Tetapi kan 200 liter

itu enggak statis karena drumbiopori itu kan berubang. Itu mungkin upaya dari kita," ucapnya.

Diketahui, kondisi permukaan air tanah di wilayah Bandung Raya kian menurun dengan rata-rata turun sedalam 60 hingga 100 meter. Ketersediaan airnya pun tergolong kritis. Berdasarkan analisis pusat air tanah dan geologi tata lingkungan (PAT-GTL), Rancaekek, Leuwigajah dan beberapa wilayah lain masuk kategori rusak. Air tanah tergolong aman ada dikedalaman 20 hingga 40 meter.

Dari analisis PATGTL, muka air tanah turun karena adanya pemakaian air oleh industri di suatu wilayah. Di samping itu, konsumsi masyarakat dengan memanfaatkan air tanah menjadi penyebab. ● **pra**

Tidak Sesuai DED, Pemkab Bogor Menolak Beroperasinya TPPAS Luna

KLAPANUNGGAL (IM)- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor berunding dengan DLH Jawa Barat terkait pengoperasian Rencana Tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Lulut-Nambo (Luna) di Bulan Januari lalu. Sikap DLH Kabupaten Bogor pun tegas menolak beroperasinya TPPAS Luna, karena pembangunan proyek tersebut tidak sesuai detail engineering design (DED) hingga dianggap bakal membawa dampak negatif kepada masyarakat sekitar Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Citeureup.

"Karena pelaksanaan pembangunan TPPAS Luna tidak sesuai DED, Pemkab Bogor pun kepada DLH Jawa Barat secara tegas menolak beroperasinya TPPAS tersebut," kata Sekretaris DLH Kabupaten

Bogor, Endah Nurmayanti kepada wartawan, Senin (6/2).

Endah Nurmayanti menentang TPPAS Luna sejak awal bakal mengolah sampah menjadi briket melalui pembakaran, sementara ini hanya bakal didaur ulang. "Kalau daur ulang kita jelas menolak, sampah harusnya dipilah dan diolah, lalu kita belum ada instalasi pembuangan air limbah (IPAL) serta tidak ada proses pembuatan briket sesuai rencana diawal," terang Endah Nurmayanti.

Ia menuturkan penolakan beroperasinya TPPAS Luna oleh Pemkab Bogor bukan berarti kami menolak program kerja Pemprov Jawa Barat. "Kalau ada masalah terkait dampak negatif dari pembuangan dan pengelolaan sampah kan warga Kabupaten Bogor yang terdampak, jadi kerugian bagi kita kalau mau begitu saja pengoperasian. ● **gio**



AGROWISATA KONSERVASI BAMBU DI BANDUNG

Petugas merawat bambu di arboretum bambu di Udjo Ecoland, Cimendan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/2). Udjo Ecoland merupakan area agrowisata yang diinisiasi oleh Saung Angklung Udjo dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi terkait konservasi bambu serta pengolahan sampah terpadu, wisata pertanian dan peternakan.